



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 6 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
UNIT KERJA : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAN KEBAKARAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : RACHMAT KARTONO
2. Jabatan : KEPALA SATUAN
3. NHK : 741320

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 500.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 105 m2/99 m2 di KAB / KOTA
MAJALENGKA, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 160.000.000

1. MOTOR, HONDA JAZZGE8 1.5 E AT (CKD) Tahun 2009, HASIL
SENDIRI Rp. 125.000.000
2. MOTOR, YAMAHA RX KING Tahun 1995, HASIL SENDIRI Rp.
20.000.000
3. MOTOR, PIAGIO VESPA EKSLUSIF Tahun 1986, HASIL SENDIRI
Rp. 15.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 50.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 37.010.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 747.010.000

III. HUTANG Rp. 166.222.060

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 580.787.940

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.